

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan tuntutan akan transparansi tata kelola, perusahaan dituntut untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) telah menjadi standar baru dalam mengukur kinerja keberlanjutan dan etika perusahaan. *Environmental, Social, and Governance* (ESG) tidak hanya meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan bisnis jangka panjang (Treepongkaruna et al., 2024). Penerapan ESG memungkinkan perusahaan untuk mengelola risiko non-keuangan, membangun reputasi positif, serta menarik investor yang semakin memprioritaskan keberlanjutan dalam keputusan investasi perusahaan. Perusahaan perlu menerapkan prinsip ESG dalam menjalankan bisnisnya sebagai bagian dari strategi keberlanjutan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola yang transparan (Rossi et al., 2024).

Pengungkapan pelaporan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) adalah bentuk transparansi perusahaan dalam menginformasikan tanggung jawab dan kinerjanya terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, yang menjadi tolok ukur penting bagi para investor, regulator, dan

pemangku kepentingan lainnya dalam menilai keberlanjutan dan risiko jangka panjang perusahaan (Lokuwaduge & De Silva, 2022). ESG bukan sekadar tren, melainkan pergeseran paradigma dari orientasi keuntungan semata menuju penciptaan nilai jangka panjang yang seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Hassan, 2024). Oleh karena itu, perusahaan yang konsisten dan jujur dalam mengungkapkan praktik ESG nya tidak hanya memperoleh kepercayaan publik yang lebih besar, tetapi juga meningkatkan reputasi, daya saing, serta stabilitas operasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Pelaporan ESG dalam perusahaan masih menghadapi berbagai permasalahan serius, terutama terkait ketidakkonsistenan standar, keterbatasan kualitas data, dan risiko manipulasi informasi. Banyak perusahaan menyusun laporan ESG secara selektif untuk membentuk citra positif di mata investor, padahal substansi keberlanjutan yang dilaporkan belum tentu mencerminkan praktik nyata (Sneideriene & Legenzova, 2025). Di negara berkembang, tantangan lain seperti minimnya tekanan regulasi, keterbatasan kapasitas pelaporan, dan dominasi kepemilikan internal perusahaan juga memperlemah komitmen ESG secara substansial (Y. Wang, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa tanpa kerangka pelaporan yang seragam dan terstandar secara global, pelaporan ESG masih rentan menjadi alat pencitraan daripada sarana akuntabilitas.

Salah satu faktor kunci yang sangat memengaruhi kualitas pengungkapan dan implementasi *Environmental, Social, and Governance* (ESG) adalah *corporate governance* atau tata kelola perusahaan. Corporate

governance yang baik mencerminkan struktur, mekanisme, dan proses pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, serta bertanggung jawab dalam mengelola kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (Ayogi & Cusnia, 2023). *Corporate governance* berperan penting dalam memastikan bahwa aspek lingkungan dan sosial benar-benar menjadi bagian dari strategi perusahaan, bukan sekadar formalitas (Prasetyo & Yanti, 2025). Misalnya, dewan komisaris yang independen dan aktif dapat mendorong manajemen untuk lebih serius dalam mengintegrasikan kebijakan keberlanjutan dan etika ke dalam operasi bisnis.

Menurut Bamahros et al. (2022), struktur tata kelola perusahaan memiliki pengaruh besar terhadap kualitas dan transparansi laporan ESG. Penelitian Masud et al. (2025) mengungkap bahwa elemen-elemen tata kelola seperti ukuran dewan, keberadaan direktur independen, dan keterwakilan perempuan di dewan direksi secara signifikan meningkatkan performa ESG, terutama dalam konteks pasar negara berkembang seperti India dan Bangladesh. Namun demikian, tidak semua mekanisme tata kelola efektif; misalnya, peran komite audit ditemukan tidak berdampak signifikan terhadap ESG. Kumar et al. (2024) menunjukkan bahwa governance yang lemah cenderung menghasilkan pelaporan ESG yang minim atau bersifat simbolis saja, sehingga gagal membangun transparansi dan legitimasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Dengan demikian, keberhasilan integrasi ESG sangat ditentukan oleh kekuatan struktur dan mekanisme tata kelola yang diterapkan perusahaan.

Corporate governance merupakan faktor memengaruhi kualitas dan efektivitas pelaporan ESG perusahaan. *Corporate governance* yang baik memastikan adanya struktur pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas yang mendorong perusahaan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari operasional bisnisnya (Sumatriani et al., 2021). Ketika struktur tata kelola ini berjalan dengan baik, perusahaan cenderung lebih proaktif dalam menyusun laporan ESG yang lengkap, akurat, dan relevan. Hal ini sejalan dengan *teori sustainability* yang menekankan bahwa keberlanjutan perusahaan tidak hanya diukur dari kinerja finansialnya, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Singh, 2024).

Menurut teori *sustainability*, perusahaan yang berkelanjutan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), bukan hanya pemegang saham. Dalam hal ini, *corporate governance* berperan sebagai penggerak utama untuk menerjemahkan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan nyata, termasuk melalui pelaporan ESG yang transparan (Elena, 2024). Teori *sustainability* mengindikasikan bahwa *good governance* adalah pondasi utama yang menjembatani tujuan finansial dan non-finansial, dan ESG merupakan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan (Sarma & Sharma, 2024). Oleh karena itu, integrasi antara tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip *sustainability* menjadi kunci dalam mendorong pelaporan ESG yang kredibel dan berkontribusi pada tujuan bisnis yang berkelanjutan.

Dalam praktik pengukuran, *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) menjadi salah satu instrumen penilaian tata kelola yang digunakan secara luas di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. ACGS menyusun tata kelola perusahaan ke dalam lima elemen utama, yaitu Hak Pemegang Saham (*Rights of Shareholders*), Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham (*Equitable Treatment of Shareholders*), Peran Pemangku Kepentingan (*Role of Stakeholders*), Pengungkapan dan Transparansi (*Disclosure and Transparency*), Tanggung Jawab Dewan (*Responsibilities of the Board*) (Ilyasa & Nurkholis, 2023). Kelima elemen ini saling terkait dan menjadi kerangka penting dalam menilai kontribusi corporate governance terhadap keberhasilan pelaporan ESG (Rahmawati et al., 2024). Dengan struktur *corporate governance* yang mengacu pada ACGS, perusahaan didorong untuk tidak hanya taat regulasi, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai keberlanjutan sebagai bagian dari strategi inti perusahaan (Putra & Adam, 2024).

Pemegang saham kini semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam pelaporan *Environmental, Social, and Governance* (ESG), mencerminkan perubahan paradigma investasi dari fokus semata pada keuntungan finansial menuju keberlanjutan jangka panjang. Fenomena ini tampak dari meningkatnya tekanan investor terhadap perusahaan untuk mengungkap dampak lingkungan, perlakuan terhadap karyawan, serta praktik tata kelola yang etis. Dalam beberapa kasus, pemegang saham bahkan menggunakan hak suara mereka dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendorong adopsi dan

peningkatan standar ESG. Hak pemegang saham terhadap pelaporan ESG menjadi alat penting dalam membentuk perilaku korporasi yang lebih bertanggung jawab, seiring meningkatnya kesadaran bahwa kinerja ESG yang baik berdampak positif terhadap nilai jangka panjang perusahaan (Wang *et al.*, 2023).

Hal ini sejalan dengan penelitian Wang *et al.*, (2023) yang menunjukkan hak pemegang saham terhadap pelaporan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berpengaruh positif, sedangkan penelitian yang dilakukan Widiastutik *et al.*, (2024) menyatakan hak pemegang saham terhadap pelaporan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berpengaruh negatif.

Perlakuan yang setara terhadap pemegang saham dalam konteks pelaporan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan dan partisipasi aktif seluruh investor, baik minoritas maupun mayoritas. Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa pemegang saham minoritas sering kali memiliki akses informasi ESG yang lebih terbatas atau kurang berpengaruh dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Di sisi lain, dalam struktur kepemilikan yang dikuasai pemegang saham pengendali, kualitas pelaporan ESG cenderung menurun karena potensi konflik kepentingan dan ketimpangan akses terhadap informasi strategis. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan perlakuan antar pemegang saham dalam pelaporan ESG bukan hanya soal keadilan, tetapi juga tentang efektivitas pengawasan dan keberlanjutan perusahaan (Widiastutik *et al.*, 2024).

Hal ini sejalan dengan penelitian Fiorillo & Santilli (2024) yang menunjukkan perlakuan yang setara terhadap pelaporan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berpengaruh positif, sedangkan penelitian yang dilakukan Huang *et al.*, (2022) menyatakan perlakuan yang setara terhadap pelaporan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berpengaruh negatif.

Peran pemangku kepentingan (investor, konsumen, regulator, dan masyarakat) dalam pelaporan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) semakin signifikan seiring meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan. Fenomena global menunjukkan bahwa dorongan dari berbagai pemangku kepentingan dapat mendorong perusahaan untuk lebih serius mengungkapkan kinerja ESG mereka, terutama ketika ada tekanan dari investor institusional dan lembaga pemeringkat ESG. Namun, di sisi lain, kurangnya kepastian standar pelaporan ESG dan minimnya keterlibatan stakeholder dalam penyusunannya masih menjadi tantangan di berbagai negara, seperti yang terjadi dalam implementasi standar ESG di Korea (Choi, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk mendorong pelaporan ESG yang kredibel dan berdampak.

Hal ini sejalan dengan penelitian Wang *et al.*, (2023) yang menunjukkan peran pemangku kepentingan terhadap pelaporan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berpengaruh positif, sedangkan penelitian yang dilakukan Gipper (2022) menyatakan peran

pemangku kepentingan terhadap pelaporan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berpengaruh negatif.

Pengungkapan dan transparansi dalam pelaporan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan investor terhadap praktik bisnis perusahaan. Di era keberlanjutan, fenomena global menunjukkan meningkatnya tuntutan agar perusahaan tidak hanya menyampaikan informasi ESG secara formal, tetapi juga dengan kualitas dan konsistensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Praktik yang tidak transparan atau pelaporan ESG yang dilakukan hanya sebagai formalitas dapat menimbulkan skeptisisme dan bahkan merusak reputasi perusahaan, seperti terlihat dalam kasus perusahaan dengan pemegang saham pengendali yang memprioritaskan kepentingan pribadi, sehingga merusak kualitas pengungkapan ESG. Oleh karena itu, pengungkapan ESG yang transparan tidak hanya soal kepatuhan, tetapi juga strategi untuk menciptakan nilai jangka panjang (Isachenkova, 2012).

Hal ini sejalan dengan penelitian Isachenkova (2012) yang menunjukkan pengungkapan dan transparansi terhadap pelaporan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berpengaruh positif, sedangkan penelitian yang dilakukan Chakrabarti & Gupta (2023) menyatakan pengungkapan dan transparansi terhadap pelaporan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berpengaruh negatif.

Tanggung jawab dewan direksi dalam pelaporan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) semakin diperkuat seiring meningkatnya

ekspektasi pemangku kepentingan terhadap tata kelola yang transparan dan berkelanjutan. Dewan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pelaporan ESG mencerminkan kinerja dan risiko nyata perusahaan. Fenomena global menunjukkan bahwa keterlibatan aktif dewan dalam agenda ESG dapat meningkatkan kepercayaan pasar dan kinerja keuangan. Sebaliknya, ketika dewan tidak kompeten dalam mengelola isu ESG, hal ini dapat memperburuk kontroversi dan risiko reputasi perusahaan. Oleh karena itu, dewan harus memosisikan diri sebagai pengarah utama dalam integrasi ESG, tidak hanya demi kepatuhan, tetapi sebagai bagian dari strategi bisnis berkelanjutan (Saygılı *et al.*, 2022).

Hal ini sejalan dengan penelitian Saygılı *et al.*, (2022) yang menunjukkan tanggung jawab dewan direksi terhadap pelaporan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berpengaruh positif, sedangkan penelitian yang dilakukan Choi (2024) menyatakan tanggung jawab dewan direksi terhadap pelaporan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berpengaruh negatif.

Penelitian ini berfokus pada perusahaan yang bergerak di sektor energi, yaitu sektor yang secara signifikan berkontribusi terhadap emisi karbon di Indonesia. Perusahaan-perusahaan dalam sektor ini, seperti perusahaan minyak, gas, batu bara, dan pembangkit listrik berbahan bakar fosil, dikenal sebagai penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan kesadaran global dan nasional terhadap isu perubahan iklim, emisi karbon dari sektor energi di Indonesia masih menunjukkan tren yang tinggi (Haludin *et al.*,

2024). Hal ini disebabkan oleh tingginya ketergantungan terhadap energi fosil dalam memenuhi kebutuhan energi nasional, serta lambatnya transisi menuju sumber energi terbarukan. Akibatnya, perusahaan-perusahaan energi di Indonesia tidak hanya menjadi pusat perhatian dalam kebijakan lingkungan, tetapi juga menjadi tolok ukur dalam mengukur komitmen industri terhadap pembangunan berkelanjutan dan target penurunan emisi karbon nasional (Adillah et al. 2025).

Hubungan antara *corporate governance* yang diukur berdasarkan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) dan ESG yang merujuk pada standar dari Kementerian Keuangan Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Penelitian yang dilakukan (Masud et al., 2025) dan (Meng, 2023) menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap pelaporan *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Kusumawati et al., 2024) dan (Annisa & Hartanti, 2021) menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh tidak signifikan terhadap pelaporan *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Terdapat inkonsistensi dari hasil penelitian tersebut, peneliti mencoba mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya, sekaligus memperkuat urgensi dan kontribusi penelitian ini dalam konteks akademik dan kebijakan.

Penelitian ini akan memeriksa dampak dari masing-masing elemen dalam kerangka ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS)

terhadap kinerja. ACGS terdiri dari beberapa pilar utama seperti hak pemegang saham, perlakuan yang setara terhadap pemegang saham, peran pemangku kepentingan, pengungkapan dan transparansi, tanggung jawab dewan. Dengan menganalisis pengaruh tiap elemen secara terpisah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen mana yang paling dominan dalam memengaruhi pencapaian ESG perusahaan. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi regulator, investor, dan manajemen perusahaan dalam memfokuskan upaya peningkatan tata kelola yang berdampak nyata terhadap keberlanjutan perusahaan, khususnya dalam sektor energi yang memiliki tanggung jawab besar terhadap isu lingkungan dan sosial.

Penelitian ini penting dilakukan karena sektor energi merupakan penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia dan menjadi sorotan dalam isu keberlanjutan. Di tengah meningkatnya tuntutan terhadap transparansi ESG, peran *corporate governance* dalam mendorong pelaporan ESG menjadi sangat relevan. Namun, kajian empiris di Indonesia, khususnya pada sektor energi masih terbatas. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dan memberikan masukan bagi perusahaan dan pembuat kebijakan dalam memperkuat tata kelola dan pelaporan keberlanjutan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka penulis melakukan penelitian mengenai “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Pelaporan *Environmental, Social, and Governance (ESG)* Pada Perusahaan Sektor Energi Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh elemen hak pemegang saham terhadap ESG Reporting?
2. Bagaimana pengaruh elemen perlakuan setara pemegang saham terhadap ESG Reporting?
3. Bagaimana pengaruh elemen peran pemangku kepentingan terhadap ESG Reporting?
4. Bagaimana pengaruh elemen pengungkapan dan transparansi terhadap ESG Reporting?
5. Bagaimana pengaruh elemen tanggung jawab dewan terhadap ESG Reporting?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang disajikan maka tujuan

dari penelitian ini ialah :

1. Untuk menganalisis pengaruh elemen hak pemegang saham terhadap ESG Reporting
2. Untuk menganalisis pengaruh elemen perlakuan setara pemegang saham terhadap ESG Reporting
3. Untuk menganalisis pengaruh elemen peran pemangku kepentingan terhadap ESG Reporting

4. Untuk menganalisis pengaruh elemen pengungkapan dan transparansi terhadap ESG Reporting
5. Untuk menganalisis pengaruh elemen tanggung jawab dewan terhadap ESG Reporting

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur akademik mengenai hubungan antara *corporate governance* dan *ESG reporting* dalam konteks perusahaan di Indonesia.
2. Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, sehingga adanya suatu perkembangan dan pembaharuan yang lebih baik dari penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi perusahaan dalam meningkatkan tata kelola dan transparansi pelaporan ESG agar lebih sesuai dengan standar global, sekaligus memberikan informasi bagi investor dalam menilai kualitas *corporate governance* dan *ESG reporting* untuk pengambilan keputusan investasi. Selain itu, temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan regulator sebagai dasar dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan standar *corporate governance* dan pelaporan ESG di Indonesia. Penelitian ini juga membantu meningkatkan kesadaran berbagai pemangku kepentingan tentang pentingnya *corporate governance* dalam mendukung keberlanjutan perusahaan dan membangun kepercayaan publik. Selain itu, perusahaan

dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai alat benchmarking untuk membandingkan kinerja ESG mereka dengan perusahaan lain dalam industri yang sama, sehingga dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan guna mencapai praktik bisnis yang lebih.

1.5 Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan

Pada bab 1 ini sistematika penulisan berisi tentang uraian-uraian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab II ini berisi tentang uraian penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual, research question dan model analisis, desain instrument kuantitatif.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab III ini berisi tentang uraian kerangka proses berfikir, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Analisis Data Dan Pembahasan

Pada bab IV dibahas tentang uraian hasil dan pembahasan yang terdiri dari analisis data, perhitungan statistik serta pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

Bab V Simpulan dan Saran

Pada bab V berisi tentang kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya serta saran sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

